

**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA
PERUSAHAAN NON MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PADA TAHUN 2018-2019**

¹Meriati Siboro, ²Else Rianai Nainggolan, ³Joana L. Saragih

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Email : merryati97@gmail.com ; nainggolanelseriani@gmail.com ; saragihjoana@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada perusahaan Non Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2019. Untuk itu dirumuskan masalah penelitian yaitu apakah perencanaan pajak berprobabilitas kemungkinan semakin tinggi terhadap manajemen laba pada perusahaan Non Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel yang di gunakan adalah *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 25 perusahaan Non Manufaktur yaitu perusahaan dagang. Data di peroleh dari www.idx.co.id tahun 2018-2019. Teknik analisis data yang di gunakan adalah analisis regresi linier sederhana, dan pengujian hipotesis menggunakan uji T dengan tingkat signifikan sebesar 5%. Dari hasil pengujian menggunakan SPSS diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) 0,194 atau 19,4%. Hasil uji secara persial (uji T) menunjukkan bahwa semakin tinggi perencanaan pajak (*tax Planning*) maka probabilitas kemungkinan manajemen laba (*Earning management*) semakin tinggi, maka perencanaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.

Kata kunci : *perencanaan pajak, manajemen laba*

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan sarana untuk menyajikan secara terstruktur posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuat keputusan ekonomi (PSAK, 2017:1). Selain itu laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen atas kepercayaan yang diberikannya untuk mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan.

Manajemen menggunakan laporan keuangan sebagai alat penting untuk beban pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajerial. Laporan keuangan memuat segala informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya yaitu *stakeholders* (Stice, et al : 2007). Laporan keuangan memuat informasi yang penting bagi perusahaan, misalnya jumlah laba. Laba merupakan gambaran kegiatan atau usaha dalam meningkatkan kualitas perusahaan. Tidak jarang laba menjadi target rekayasa yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk meminimalkan atau memaksimalkan laba. Usaha inilah yang bisa disebut dengan manajemen laba (*earning manajemen*).

Menurut Scott (2006 : 344) mendefinisikan “manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dari standar akuntansi keuangan yang ada dan dengan demikian maka secara langsung dapat memaksimalkan utilitas atau nilai pasar perusahaan”. Konsep mengenai manajemen laba dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan teori keagenan (*agency theory*). Teori tersebut menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak yang berkepentingan (*principal*) dengan manajemen sebagai pihak yang menjalankan kepentingan (*agent*). Konflik ini muncul pada saat setiap pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkannya.

Manajemen laba yang dibuat oleh perusahaan dapat dilakukan dengan memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi dan pemilihan metode akuntansi. SAK mengizinkan

manajemen untuk melakukan *judgement* terhadap estimasi akuntansi, seperti estimasi piutang tak tertagih, masa manfaat aset tetap dan nilai sisa dari aset tetap tersebut serta kurun waktu amortisasi aset tak berwujud. Sedangkan dalam peraturan perpajakan, estimasi piutang tak tertagih tidak diizinkan sebagai pengurang pendapatan dalam menghitung laba fiskal.

Peraturan perpajakan juga sudah mengatur masa manfaat aset tetap dan aset tak berwujud serta tarif penyusutannya yang dibedakan berdasarkan pengelompokan aset tersebut. Tindakan manajemen laba sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya. Artinya tindakan manajemen laba dilakukan mengandung motivasi-motivasi tertentu, karena tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh sering dikaitkan dengan prestasi manajemen, memang sesuatu yang lazim besar kecilnya bonus yang akan diterima oleh manajemen tergantung dari besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan. Selain motivasi bonus motivasi penghematan pajak menjadi motivasi yang paling nyata.

Menurut Philips, et al (2003) terdapat dua insentif utama yang menjadi motivasi perusahaan dalam melakukan manajemen laba, pertama untuk menghindari penurunan laba, hal ini dilakukan dengan tujuan agar laba yang tersaji dalam laporan keuangan tidak mengalami fluktuasi laba, akan berdampak kurang baik terutama bagi pihak investor, kedua untuk menghindari kerugian, perusahaan yang mengalami kerugian akan berpotensi menurunkan harga saham, sehingga akan berdampak pada kehilangan kepercayaan dari para penanam modal, selain itu juga akan mendorong pemerintah untuk melakukan pemeriksaan pajak.

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) No. 28/2007, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bagi suatu perusahaan, pajak yang ditanggung merupakan suatu elemen biaya yang mengurangi laba perusahaan, karena semakin tinggi pajak yang ditanggung oleh suatu perusahaan berarti semakin kecil pula laba yang akan didapatkan perusahaan tersebut, sehingga timbul suatu kecenderungan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Upaya meminimalkan pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*), (Suandy, 2008).

Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*Tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Menurut Lyons Susan M, (1996) perencanaan pajak adalah pengaturan bisnis seseorang dan atau urusan pribadi untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam melakukan manajemen pajak, pada umumnya perencanaan pajak (*tax planning*) berfungsi untuk meminimumkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak bertujuan untuk meredakan beban pajak (*tax burden*) agar dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Perencanaan pajak berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, usaha untuk meminimumkan kewajiban pajak yang dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan (Suandi, 2016).

Sulistiyanto (2008:41) menyatakan “Dalam perpajakan upaya pemerataan laba dilakukan agar perusahaan dapat mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah pada periode berjalan”. Tujuan perusahaan ingin penundaan pembayaran pajak sesungguhnya serta perusahaan menginginkan pajak yang dibayar benar-benar lebih rendah dibandingkan kewajibannya.

Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak, karena hal itu timbul keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil

mungkin Suandy, (2011: 117). Perencanaan pajak dilakukan dengan berbagai cara agar pembayaran pajak mampu ditekan seminimal mungkin sehingga laba perusahaan semakin meningkat. Cara yang ditempuh manajer untuk meminimalkan pembayaran pajak tersebut merupakan tindakan manajemen laba. Dengan demikian semakin besar perencanaan pajak maka semakin tinggi perusahaan melakukan manajemen laba.

fenomena perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yaitu perusahaan dagang yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2018-2019

Tabel 1. Perencanaan Pajak Dan Manajemen Laba

No	Kode Emiten	Nama Perusahaan	Tahun	Perencanaan Pajak	Manajemen Laba
1	APII	Aitha Prima Indonesia Tbk	2018	0,747842	0,080917
			2019	0,751642	0,054255
2	EPMT	Esenval Putera Megatranding Tbk, PT	2018	0,752391	0,040944
			2019	0,724757	0,058899

Sumber: Data diolah dari www.idx.co.id

Dilihat dari tabel 1. yang menunjukkan data perusahaan Aritha Prima Indonesia Tbk dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan nilai Perencanaan Pajak dari 0,747842 menjadi 0,751642 dan nilai Manajemen Laba mengalami penurunan nilai dari 0,080917 menjadi 0,054255. Berbeda dengan perusahaan Esenval Putera Megatranding Tbk, PT dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan nilai Perencanaan Pajak dari 0,752391 menjadi 0,724757, dan nilai Manajemen Laba mengalami kenaikan dari 0,040944 menjadi 0,058899, Sehingga dari data fenomena diatas menunjukan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Hubungan perencanaan pajak terhadap manajemen laba secara konseptual bisa dijelaskan dengan teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan ini pertama kali diungkapkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori tersebut menyatakan bahwa manajemen laba ini muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan (*agent*) dengan pemerintah (*principal*). dimana perusahaan berupaya membayar pajak seminimal mungkin karena dianggap bahwa dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. sementara bagi pemerintah memerlukan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran Negara. Perselisihan yang terjadi antar pemerintah yang ingin memungut pajak sebesar-besarnya dari beberapa perusahaan ini menjadikan manajemen perusahaan berfikir ulang untuk melakukan perencanaan pajak agar bisa membayar pajak seminimal mungkin sehingga laba perusahaan tidak berkurang lebih banyak.

Berdasarkan data fenomena yang diuraikan di atas sehingga membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax Planing*) Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia**”.

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah yang dapat diambil oleh peneliti adalah apakah perencanaan pajak (*tax planing*) berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2019 ?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi bukti empiris mengenai pengaruh perencanaan pajak (*tax planing*) pada manajemen laba terhadap perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) No. 28/2007, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem Pemungutan Pajak

1. Official Assesment System. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku,
2. 2 Self assesment system. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. 3 With Holding system. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pajak Penghasilan Badan Pajak penghasilan badan (Pph Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP. Tarif Wajib Pajak Badan Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008, tarif PPh untuk WP Badan terdiri dari 3 (tiga) tarif, yaitu tarif sesuai Pasal 17 ayat (2a) UU PPh, tarif sesuai Pasal 17 ayat (2b) UU PPh, dan tarif sesuai Pasal 31E UU PPh, yaitu sebagai berikut: 1 Tarif Pasal 17 Ayat (2a) UU PPh. Besarnya tarif PPh adalah 25% (dua puluh lima persen) dan sudah diberlakukan sejak Tahun Pajak 2010. Tarif PPh ini adalah tarif umum yang berlaku bagi semua WP Badan, khususnya WP Badan yang tidak memenuhi syarat Pasal 17 ayat (2b) maupun Pasal 31E UU PPh. 2 Tarif Pasal 17 Ayat (2b) UU PPh. Bagi WP Badan berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk atau go public), mendapat pengurangan tarif sebesar 5% (lima persen) dari tarif normal atau dengan kata lain mulai Tahun Pajak 2010, tarif untuk WP Badan yang sudah go public adalah 20% (dua puluh persen). WP Badan yang berhak mendapat penurunan atau pengurangan tarif PPh ini adalah WP Badan yang sudah go public dengan kriteria sebagai berikut: 1) Saham diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 2) Jumlah saham yang dilempar ke publik minimal 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki oleh minimal 300 pihak (pemegang saham) baik orang pribadi ataupun badan. 3) Masing-masing pihak (pemegang saham) hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor. Kondisi yang disebutkan pada kedua poin terakhir tersebut harus dipenuhi dalam jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Jika salah satu dari ketiga kriteria tersebut di atas tidak terpenuhi, maka WP Badan tersebut harus menggunakan tarif PPh yang ditetapkan dalam Pasal 17 ayat (2a) UU PPh, yaitu sebesar 25 % (dua puluh lima persen). 3. Tarif Pasal 31E UU PPh. Besarnya tarif PPh menurut pasal ini adalah 50% (lima puluh persen) dari tarif umum yang disebutkan pada Pasal 17 ayat (1) huruf b atau Pasal 17 ayat (2b) UU PPh. Dengan kata lain, ada diskon tarif PPh sehingga tarif yang dikenakan kepada WP Badan yang memenuhi syarat hanya sebesar 14% (untuk tahun pajak 2009) atau 12,5% (mulai tahun pajak 2010). WP Badan yang berhak mengenyam fasilitas ini adalah WP Badan yang jumlah peredaran brutonya dalam satu tahun Pajak tidak lebih dari Rp 50 milyar. Cara perhitungannya dapat dilihat pada memori penjelasan Pasal 31E UU PPh. Menurut penegasan dalam poin 2.c. Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor SE66/PJ./2010 tanggal 24 Mei 2010, yang dimaksud dengan “peredaran bruto” adalah

penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sebelum dikurangi dengan biaya fiscal.

Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontaprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kemudian definisi tersebut disempurnakan. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (Resmi 2017:1).

Adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemerintah, sering kali membuat manajer melakukan berbagai cara agar dapat meminimumkan pembayaran pajak. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakuakn melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Secara umum manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Sophar Lumbantoran, 1996).

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Menurut Crumbley D. Larry, Friedman Jack P., dan Anders Susan B., 1994) menjelaskan bahwa perencanaan pajak adalah analisis sistematis opsi penangguhan pajak yang ditujukan untuk meminimalkan kewajiban pajak pada periode saat ini dan masa depan (*tax planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods*).

Cara Untuk Meminimalkan Beban Pajak

Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (unlawful). Istialh yang sering digunakan adalah tax avoidance dan tax evasion.

Lumbantoran (1996:489) menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak, diantaranya yaitu:

1. Pergeseran pajak (*Tax Shifting*) adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak yang lainnya. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak dimungkinkan sekali tidak menanggung beban pajaknya.
2. Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli.
3. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
4. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah penghindaran pajakyang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dilakukan dengan cara memanipulasi secara illegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya.
5. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang rill yang dapat diterima oleh fiskus. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah rekayasa “tax affairs” yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada.

Menurut Hidayat (2012: 312) ada empat langkah pokok yang harus dilakukan dalam perencanaan, yaitu:

1. Tetapkan sasaran atau perangkat tujuan.
2. Tentukan situasi sekarang.
3. Identifikasi pendukung dan penghambat tujuan.
4. Kembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan.

Semakin besar pajak yang ditanggung, maka semakin kecil laba yang ditetapkan perusahaan sehingga timbul kecenderungan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak secara efisien ini sering disebut dengan perencanaan pajak (Tax Planing) atau tax sheltering (suandy, 2003:2).

Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan dari perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia, baik untuk dibagi kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali. Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik adalah sbb:

1. Meminimalisir beban pajak yang terutang.

Tindakan yang harus di ambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam lingkup dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Memaksimalkan laba setelah pajak
3. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan efektif sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, antara lain:
 - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana seperti bunga, kenaikan, denda dan hukum kurungan (penjara).
 - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, pasal 23).

Manajemen Laba (Earning Management)

Manajemen laba merupakan aktivitas manajerial untuk “mempengaruhi” laporan keuangan baik dengan cara memanipulasi data atau informasi keuangan perusahaan maupun dengan cara pemilihan metode akuntansi yang diterima dalam prinsip akuntansi berterima umum, yang pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan perusahaan. (Aditama,2014)

Copeland (1968) dalam Utami (2005) mendefinisikan manajemen laba sebagai ”Some ability to increase reported net income at will”, yang berarti manajemen laba adalah usaha atau kemampuan manajemen untuk meningkatkan perolehan laba, termasuk mendistribusikan laba sesuai dengan keinginan manajer. Sedangkan manajemen laba menurut Sumomba (2012) adalah suatu intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Intervensi disini memiliki arti upaya yang dilakukan oleh manajer untuk memengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholders yang membutuhkan informasi mengenai kinerja dan kondisi perusahaan (Wild et al : 2004).

Teori yang Melandasi Manajemen Laba

Munculnya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen di landasi oleh dua teori, yaitu agency theory (teori keagenan) dan dan positive accounting theory (teori akuntansi positif). Jensen dan Meckling (1974) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu atau lebih principal (pemilik) menggunakan pihak lain atau agent (manajer) untuk menjalankan perusahaan. Dalam teori keagenan, yang dimaksud dengan principal adalah pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan.

Agen adalah manajemen yang memiliki kewajiban yang mengelola perusahaan sebagaimana yang telah diamanahkan principal kepadanya.

a. Signaling Theory

Widyaningdyah dan Listiyana (2009) menuturkan bahwa teori sinyal menjelaskan tentang bagaimana perusahaan dapat memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal tersebut adalah informasi – informasi tentang kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik (prinsipal), misalnya berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa suatu perusahaan dapat dikatakan lebih baik dari perusahaan lain. Selain itu, teori sinyal juga menjelaskan bahwa pemberian sinyal yang dilakukan oleh manajer digunakan untuk meminimalisir adanya asimetri informasi. Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba lebih berkualitas karena prinsip ini dapat mencegah perusahaan melakukan tindakan manipulasi laba.

Teori sinyal juga menjelaskan bahwa perusahaan memiliki motivasi untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal karena adanya asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak eksternal. Perusahaan (agent) mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang yang berasal dari pihak investor maupun kreditor. Kurangnya informasi pihak eksternal mengenai perusahaan menyebabkan pihak eksternal cenderung untuk melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Namun demikian, perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meminimalisir asimetri informasi. Salah satu cara untuk meminimalisir asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal kepada pihak eksternal, salah satunya berupa informasi yang dapat dipercaya dan dapat meminimalisir ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang. Selain itu, teori sinyal juga dapat membantu pihak perusahaan (agent), pemilik (prinsipal), dan pihak eksternal dalam meminimalisir asimetri informasi dengan menghasilkan kualitas atau integritas informasi laporan keuangan (Widyaningdyah dan Listiyana : 2009).

b. Agency Theory

Teori yang melandasi munculnya praktik manajemen laba yaitu teori keagenan (agency theory) dan teori akuntansi positif (positive accounting theory). Hal ini didukung oleh pernyataan Jensen dan Meckling (1974) dalam Setiowati (2007) yang mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih principal (pemilik) menggunakan pihak lain yang disebut agent (agen) untuk menjalankan sebuah perusahaan. Hal ini tentunya akan menimbulkan asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara principal dan agent yang mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh principal, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan informasi.

Agency theory memiliki asumsi bahwa agent dan principal, keduanya termotivasi untuk memperoleh kesejahteraan dan kepentingan masing-masing. Pihak agent termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan kompensasi maupun bonus. Sedangkan principal termotivasi dalam pengadaan kontrak dengan tujuan untuk menyejahterakan dirinya melalui pembagian dividen maupun kenaikan harga saham perusahaan. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi tersebut dapat mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh principal sehingga agent menyajikan informasi yang tidak sebenarnya, terutama informasi yang berkaitan dengan kinerja agent pada principal. Hal ini membuat konflik kepentingan semakin meningkat dimana principal tidak memiliki kemampuan dalam memonitor aktivitas dan kinerja agent dalam perusahaan. Sehingga principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent. Berbeda dengan principal, agent memiliki lebih banyak informasi tentang kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi antara agent dan principal.

c. Positive Accounting Theory

Teori akuntansi positif yang dipelopori oleh Watts dan Zimmerman (1986) dalam Astutik dan Mildawati (2016) memaparkan bahwa faktor-faktor ekonomi tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. Hal ini didukung oleh Januarti (2004) yang menjelaskan teori akuntansi positif merupakan bagian dari teori keagenan. Hal ini karena teori akuntansi positif mengakui adanya hubungan keagenan, yaitu:

- a. Antara manajemen dengan pemilik (*the bonus plan hypothesis*).
- b. Antara manajemen dengan kreditor (*The Debt to Equity Hypothesis*)
- c. Antara manajemen dengan pemerintah (*The Political Cost Hypothesis*)

Tiga hipotesis utama dalam teori utama dalam akuntansi positif yang menjadi dasar penembangan pengujian hipotesis untuk mendeteksi manajemen laba sebagai berikut:

1. The Bonus Plan Hypothesis

Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan supaya manajer dapat memperoleh bonus yang maksimal setiap tahun, karena keberhasilan kinerja manajer di ukur dengan besarnya tingkat laba yang di peroleh perusahaan.

2. The Debt to Equity Hypothesis (Debt Covenant Hypothesis)

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan di dalam perjanjian utang (debt covenant). Sebagian besar perjanjian utang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa perjanjian. Ketika perusahaan mulai terancam melanggar perjanjian utang, maka manajer perusahaan akan berusaha untuk menghindari terjadinya perjanjian utang tersebut dengan cara memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Pelanggaran terhadap perjanjian utang dapat mengakibatkan sanksi yang pada akhirnya akan membatasi tindakan manajer dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan meningkatkan laba (melakukan income increasing) untuk menghindari atau setidaknya menunda pelanggaran perjanjian.

3. The Political Cost Hypothesis

Scott (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya.

Teknik Manajemen Laba

Laporan keuangan merupakan media komunikasi utama antara manajer perusahaan dengan stakeholder. Ada beberapa kaidah agar laporan keuangan dapat menjalankan fungsinya yakni pertama, laporan keuangan menyediakan informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Kedua, laporan keuangan harus netral dari keinginan pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi dari informasi yang disajikan dalam laporan tersebut. Ketiga, laporan keuangan harus menyajikan informasi yang lengkap atau komprehensif. Keempat laporan keuangan harus memiliki daya banding dan uji. Ada empat cara yang digunakan manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu :

1. Mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih.
2. Mencatat pendapatan palsu
3. Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat atau lebih lambat
4. Tidak mengungkapkan semua kewajiban

Motivasi Manajemen Laba

Scott (2000) mengemukakan bahwa terdapat beberapa motivasi yang dapat mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu motivasi bonus, motivasi kontraktual lainnya,

motivasi politik, motivasi pajak, pergantian CEO, initial public offering, dan pemberian informasi kepada investor. Berikut ini akan diuraikan setiap motivasi dari praktik manajemen laba.

1. Motivasi Bonus (*Bonus Purposes*)

Perusahaan berusaha memacu dan meningkatkan kinerja karyawan (dalam hal ini manajemen) dengan cara menetapkan kebijakan pemberian bonus setelah mencapai target yang ditetapkan. Seringkali laba dijadikan sebagai indikator dalam menilai prestasi manajemen yaitu dengan cara menetapkan tingkat laba yang harus dicapai dalam periode tertentu. Oleh karena itu, manajemen berusaha mengatur laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang akan diterimanya.

2. Motivasi Kontraktual Lainnya (*Other Contractual Motivation*)

Manajer memiliki dorongan untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat memenuhi kewajiban kontraktual termasuk perjanjian utang yang harus dipenuhi karena bila tidak perusahaan akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu, manajer melakukan manajemen laba untuk memenuhi perjanjian utangnya.

3. Motivasi Politik (*Political Motivation*)

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

4. Motivasi Pajak (*Taxation Motivation*)

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi dalam melakukan manajemen laba. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan untuk penghematan pajak penghasilan. Manajer termotivasi melakukan manajemen laba untuk memengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan yaitu dengan cara menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

5. Pergantian CEO (*Chief Executive Officer*)

CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. CEO yang akan diganti melakukan pendekatan strategi dengan cara memaksimalkan laba agar kinerjanya dinilai baik.

6. Initial Public Offering (IPO)

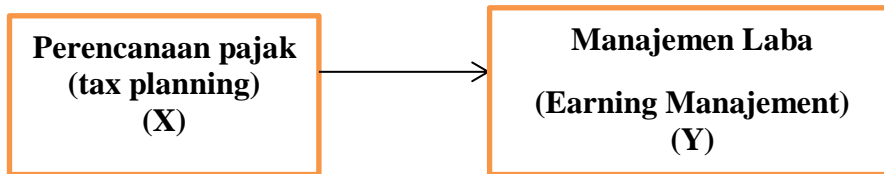
Perusahaan yang pertama kali akan go public belum memiliki nilai pasar. Hal ini akan memotivasi manajer perusahaan yang akan go public untuk melakukan manajemen laba dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

7. Pemberian Informasi Kepada Investor (*Communicate Information to Investor*)

Pada umumnya, investor lebih tertarik pada kinerja keuangan perusahaan di masa datang. Investor juga cenderung melihat laporan keuangan dalam menilai suatu perusahaan. Karena informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor, maka pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik.

Pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba

Perencanaan pajak dapat berpengaruh terhadap ekuitas laba perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena dengan perencanaan pajak yang tepat dan legal, perusahaan dapat memperoleh laba bersih yang rasional dan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan perencanaan pajak. Secara ekonomis, pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Perusahaan pada umumnya mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut untuk mengoptimalkan laba setelah pajak yang akan diperoleh, dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sehingga mendorong manajer untuk menekan biaya seoptimal mungkin (Suandy : 2011)



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian meliputi pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun pengamatan yaitu 2018-2019. Penelitian ini dilakukan melalui situs www.idx.co.id. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya dengan teknik dokumentasi dan studi pustaka yang diperoleh melalui laporan keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia maupun literatur seperti jurnal, artikel, dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Populasi merupakan keseluruhan objek yang akan diteliti atau karakteristik yang hendak disuga. Maka populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan tahunan perusahaan Nonmanufaktur yaitu perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2019.

Sampel merupakan bagian dari anggota populusi yang diharapkan mampu mewakili informasi yang sesungguhnya dalam penelitian. Sedangkan teknik pengambilan Sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Adapun Kriteria perusahaan yang di jadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan merupakan perusahaan nonmanufaktur yaitu perusahaan dagang *go public* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2019.
2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan perusahaan secara berturut-turut pada tahun 2018-2019.
3. Perusahaan yang memperoleh laba positif.
4. Laporan keuangan yang dinyatakan dalam nilai Rupiah secara konsisten selama periode penelitian.

Operasioanalisis Variabel

Objek penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas (*independent variabel*) dan satu variabel terikat (*dependent variabel*).

a. Perencanaan pajak

perencanaan pajak diukur dengan menggunakan *Tax Retention Rate* (tingkat retensi pajak) yang merupakan alat dengan fungsi untuk menganalisa suatu ukuran dari tingkat efektifitas manajemen pajak yang dilakukan pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Wild et al., 2004), dengan rumus sebagai berikut

$$TRR = \frac{\text{Net Income}}{\text{Pretax Income (EBIT)}_{it}}$$

TRR_n : Tax retention rate (tingkat retensi pajak) perusahaan I pada tahun t

Net income_t : Laba bersih perusahaan I pada tahun t

pretak income : Laba sebelum pajak perusahaan I tahun t

b. Manajemen Laba

Manajemen laba di hitung menggunakan model *discretionary accruals* dalam menghitung manajemen laba peneliti menggunakan *modified jones model*. Kelebihan model ini adalah memecah

total akrual menjadi *discretionary accruals* dari aktiva lancar (*current assets*) dan *non-discretionary accruals* dari aktiva tidak lancar (*fixed assets*).

Tahap-tahap penentuan *discretionary accruals* adalah sebagai berikut:

1. Mengukur total akrual

$$(\text{Total accrual}) TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

NI_{it} = laba bersih (Net Income) perusahaan I pada akhir tahun t.

CFO_{it} = Arus kas dari aktivitas operasi perusahaan I pada akhir tahun t.

2. Menghitung nilai akrual yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS (Ordinary Least Square)

$$\frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right)$$

TAC_{it} = Total akrual perusahaan I pada tahun t.

A_{it-1} = Total aset untuk sampel perusahaan i pada akhir tahun t-1 (sebelumnya).

ΔRev_{it} = Perubahan pendapatan perusahaan I dari tahun t-1 ke tahun t.

PPE_{it} = Aset tetap (gross property plant and equipment) perusahaan t.

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien yang diperoleh dari hasil regresi pada total akrual.

3. Menghitung Non Discretionary Accrual Model

$$NDA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{(\Delta Rev_{it} - \Delta Rec_{it})}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right)$$

NDA_{it} = Non-Discretionary Accrual perusahaan I pada tahun t (sekarang).

ΔRec_{it} = Perubahan piutang usaha perusahaan i di tahun t-1 ke tahun t.

4. Menghitung Discretionary Accrual

$$DA_{it} = \left(\frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} \right) - NDA_{it}$$

DA_{it} = Nilai discretionary akrual perusahaan i di tahun t (sekarang).

TAC_{it} = Total akrual perusahaan I pada tahun t.

A_{it-1} = Total aset untuk sampel perusahaan i pada akhir tahun t-1 (sebelumnya).

NDA_{it} = Non-Discretionary Accrual perusahaan I pada tahun t (sekarang).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan nonmanufaktur yaitu perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2019. Sumber data diperoleh dari www.idx.co.id yang merupakan situs resmi yang menerbitkan laporan keuangan tahunan perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah jadi atau yang telah diolah oleh orang lain. Sehingga peneliti dapat memanfaatkan data tersebut dengan cara mencatat ulang, memotret, ataupun dengan membeli.

Teknik Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak (*tax planing*) terhadap manajemen laba pada penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis statistik dengan menggunakan bantuan program SPSS. Untuk mencari pengaruh atau hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model analisis regresi linier sederhana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba pada perusahaan Nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak.

a. Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan suatu tindakan dalam memilih suatu tindakan kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan dan kebijakan akuntansi yang dimaksud adalah penggunaan accrual dalam menyusun laporan keuangan. Model Jones Dimodifikasi (*modified jone model*) banyak digunakan dalam penelitian –penelitian akuntansi karena dinilai merupakan model yang paling baik dalam medeteksi manajemen laba dan memberikan hasil yang paling robust.

Tahap-tahap penentuan discretionary accruals adalah sebagai berikut:

1. Menghitung total akrual dengan menggunakan pendekatan aliran kas (cash flow approach)

PT. MILENIUM Parmachon Internasional Tbk, memiliki laba untuk tahun 2018 sebesar Rp19.444.262.069 dan arus kas dari aktivitas tahun 2018 sebesar -Rp126.981.520.345

$$TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

$$= 19.444.262.069 - (-126.981.520.345)$$

$$= 146.425.782.414$$

2. Menentukan koefisien dari regresi total akrual

$$\frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right)$$

$$\frac{146.425.782.414}{938.005.256.482} = -0,157 \frac{1}{938.005.256.482} + 0,097 \frac{265.357.766.014}{938.005.256.482} +$$

$$-0,201 \frac{19.895.955.091}{938.005.256.482}$$

$$= 0,156103371 = -0,157 (0.000000000001066) + 0,097 (0.28289582) +$$

$$-0,201 (0.021210921)$$

$$= 0,156103371 = -0.000000000000167 + 0.027556315592798 +$$

$$-0.004253919$$

3. Menentukan Non discretionary accruals

$$NDA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{(\Delta Rev_{it} - \Delta Rec_{it})}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right)$$

$$0.007805973560942 = -0,157 \frac{1}{938.005.256.482} + 0,097 \frac{265.357.766.014 - 149.225.177.072}{938.005.256.482} +$$

$$-0,201 \frac{19.895.955.091}{938.005.256.482}$$

$$0.007805973560942 = -0.000000000000167 + 0.012059893 + -0.004253919$$

4. Menentukan discretionary accruals

$$DA_{it} = \left(\frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} \right) - NDA_{it}$$

$$DA_{it} = 0,156103371 - 0.007805973560942$$

$$DA_{it} = 0.148297397291341$$

Dari hasil perhitungan discretionary accrual yang digunakan sebagai indikator untuk menentukan manajemen laba oleh suatu perusahaan terhadap 25 perusahaan nonmanufaktur yang melakukan manajemen laba pada tahun 2018-2019. Secara empiris nilai discretionary bisa nol, positif atau negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan selalu melakukan manajemen laba dalam mencatat dan menyusun informasi keuangannya. Nilai nol menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan pola perataan laba (*income smoothing*), sedangkan nilai positif menunjukan bahwa manajemen laba dilakukan dengan pola menaikkan laba (*income increasing*) dan nilai negatif menunjukan manajemen laba dilakukan dengan pola penurunan laba (*income decreasing*).

Dari perhitungan manajemen laba di atas Nilai positif pada discretionary accruals artinya menunjukan bahwa manajemen laba dilakukan dengan pola menaikkan laba (*income increasing*).—



Dari data diatas dapat dilihat bahwa manajemen laba mengalami fluktuasi dari tahun ketahun baik dengan teknik positif maupun negatif laba. Berdasarkan data yang terlihat bahwa nilai yang tertinggi untuk manajemen laba pada tahun 2018 dimiliki oleh PT.Mitra Pinastika Mustika Tbk, sebesar 0.408653 sementara di tahun 2019 dimiliki oleh Multi Indocitra Tbk sebesar 0.10245419. Sedangkan nilai terendah untuk tahun 2018 dimiliki oleh Matahari Departemen Store Tbk sebesar -0.11882444, dan nilai terendah tahun 2019 dimiliki oleh Duta Iintidaya Tbk sebesar -0.404756.

b. Perencanaan Pajak

Dalam penelitian ini perencanaan pajak sebagai variabel bebas yang diukur dengan menggunakan *Tax Retention Rate* (tingkat retensi pajak) yang merupakan alat dengan fungsi untuk menganalisa suatu ukuran dari tingkat efektifitas manajemen pajak yang dilakukan pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Wild et al., 2004).

Adapun cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$TRR = \frac{Net\ Income}{Pretax\ Income\ (EBIT)_{it}} = \frac{7.880.007.292}{11.969.483.578} = 0,65834146$$

Dari perhitungan perencanaan pajak di atas Nilai positif pada Tax Retention Rate artinya menunjukan bahwa perencanaan pajak dilakukan dengan efektif melalui perbandingan dari laba bersih dengan laba sebelum pajak perusahaan.

Berdasarkan data hasil perhitungan perencanaan pajak pada tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa perencanaan pajak mengalami fluktuasi dari tahun ketahun. Berdasarkan data terlihat nilai tertinggi untuk perencanaan pajak pada tahun 2018 dimiliki oleh PT. Mitra Pinastika Mustika, Tbk sebesar 16,41597414 sementara di tahun 2019 dimiliki oleh PT. Duta Intidaya Tbk sebesar 1,466141721. Sedangkan nilai terendah untuk tahun 2018 dimiliki oleh PT.Bintang Oto Global, Tbk sebesar 0,62458382 dan nilai terendah tahun 2019 dimiliki oleh dimiliki oleh PT.Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk sebesar 0,151184094.

Analisis Statistika Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
perencanaan pajak	50	.15118	16.41597	1.1376527	2.22678108
manajemen laba	50	-.40476	.40865	.0251452	.12077803
Valid N (listwise)	50				

Sumber : Hasil Output SSPS22

Berdasarkan output uji deskriptif di atas diketahui bahwa pada variabel perencanaan pajak diperoleh nilai rata-rata sebesar 1.1376 dengan nilai terendah perencanaan pajak yang diperoleh sebesar 0.15118 dan nilai tertinggi perencanaan pajak yang diperoleh adalah 16.41597 . Sedangkan pada variabel manajemen laba diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,0251452 dengan nilai terendah manajemen laba yang diperoleh sebesar -0.40476 dan nilai tertinggi manajemen laba diperoleh sebesar 0.408653.

Asumsi Klasik

Asumsi Klasik merupakan uji pra-syarat yang harus dilakukan sebelum uji hipotesis. Dalam penelitian ini uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear sederhana dimana asumsi yang harus terpenuhi adalah data harus berdistribusi normal.

a.Normalitas



Uji normalitas data adalah hal yang lazim dilakukan sebelum sebuah metode statistik. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah uji *kolmogorov-smirnov*. Data dikatakan berdistribusi normal jika memperoleh nilai signifikansi > 0.05. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.4

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.10846327
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.073
	Negative	-.106
Test Statistic		.106
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan output diatas diperoleh nilai signifikansi > 0.05 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4. Analisis Regresi Linier Sederhana

a. Koefisien Determinasi

Tabel 4 Hasil Uji Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.440 ^a	.194	.177	.10958728

- a. Predictors: (Constant), perencanaan pajak
- b. Dependent Variable: manajemen laba

Berdasarkan output diatas didapatkan nilai R² sebesar 0,194 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan pajak mempengaruhi manajemen laba sebesar 19,4%.

b. Uji T

Analisis pengujian individual atau parsial (Uji t) diperlukan untuk mengetahui bahwa variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Pengambilan keputusan dalam uji ini didasarkan pada tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Hasil uji T dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Dasar pengambilan keputusan uji t adalah jika :

a. $T_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel bebas berpengaruh signifikan

b. $T_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak berpengaruh secara signifikan

n = jumlah responden , k =variabel bebas,

Rumus untuk mencari T tabel adalah :

T tabel = ($\alpha/2$; $n-k-1$)

T tabel = ($0,05/2$; $50-1-1$)

T tabel = ($0,025$; 48)

T tabel = **2.011**

Tabel 5. Hasil Uji T

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.002	.017		-.115	.909
	perencanaan pajak	.024	.007	.440	3.394	.001

a. Dependent Variable: manajemen laba

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kearsipan memperoleh nilai t hitung sebesar 3.394 > 2.011 dan nilai signifikansi sebesar 0.001 < 0.05, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.

d. Analisis Persamaan Regresi Linear Sederhana

Berdasarkan output uji T di atas dapat dirumuskan persamaan regresi linear sederhana pada penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = -0.002 + 0.024 X$$

a. Nilai konstanta diperoleh nilai sebesar -0.002 artinya jika tidak ada perencanaan pajak maka nilai konstanta dari manajemen laba adalah sebesar -0.002.

b. Angka koefisien regresi dari kualitas jasa sebesar 0.024 artinya setiap penambahan 1% dari perencanaan pajak maka nilai dari manajemen laba akan menurun sebesar 0.024.

Penelitian ini merupakan studi mengenai manajemen laba (*earning management*). Penelitian ini menggunakan variabel perencanaan pajak dilakukan terhadap 25 perusahaan sampel perusahaan nonmanufaktur yaitu perusahaan dagang pada periode 2018-2019 yang telah di pilih menggunakan metode *purposive sampling*.

Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kearsipan memperoleh nilai t hitung sebesar 3.394 > 2.011 dan nilai signifikansi sebesar 0.001 < 0.05, maka H_0 ditolak dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, sehingga semakin tinggi perencanaan pajak (Tax Planning) maka probabilitas kemungkinan manajemen laba (*earning management*) semakin tinggi .

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nuraida dan Sayidah (2019) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Tetapi hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Enny Endriati (2014) dan ferry aditama (2014) bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini berpengaruh positif signifikan hal di karenakan perusahaan melakukan penghematan pembayaran pajak yang akan di bayarkan kepada pemerintah.

Melalui perencanaan pajak dimana perusahaan berupaya membayar pajak seminimal mungkin karena dianggap bahwa dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. sementara bagi pemerintah memerlukan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran Negara. Perselisihan yang terjadi antar pemerintah yang ingin memungut pajak sebesar-besarnya dari beberapa perusahaan ini menjadikan manajemen perusahaan berfikir ulang untuk melakukan perencanaan pajak agar bisa membayar pajak seminimal mungkin sehingga laba perusahaan tidak berkurang lebih banyak. Maka ketika di lakukannya perencanaan pajak, akan mempengaruhi manajemen dalam melakukan manajemen laba.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh perencanaan pajak (Tax Planning) terhadap manajemen laba (*Earning Manajemen*). Penelitian ini menggunakan 25 sampel perusahaan Non Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu perusahaan dagang dari tahun 2018-2019. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan regresi linier sederhana, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil pengujian regresi linier sederhana menunjukkan bahwa variabel perencanaan pajak (Tax Planning) semakin tinggi maka probabilitas kemungkinan semakin tinggi terhadap manajemen laba (Earning management), untuk menghindari melaporkan kerugian pada perusahaan Non Manufaktur yaitu perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Persamaan regresi linier sederhana yang diperoleh dari hasil penelitian adalah
$$Y = -0.002 + 0.024 X$$

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Ferry dan Anna Purwaningsih. 2014. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. MODUS, Vol.26, No. 01
- Dergibson Siagian Sugiarto.2006. Metode statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi. Gramedia Pustaka Utama.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lumbantoruan, Sophar. 1996. Akuntansi Pajak. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Nuraida, Sayidah. 2019. Pengaruh perencanaan pajak (Tax Planing) terhadap manajemen laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdaftar di Bursa Eferk Indonesia. Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
- Pajak, D. J. (2019, September 10). Fasilitas Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berbentuk Perseroan Terbuka. Retrieved from pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/fasilitaspenurunan-tarif-pajak-penghasilan-bagiwajib-pajak-badan-dalam-negeri-berbentukperseroan>
- Philips, John, Morton Pincus dan Sonja Olhoft Rego. 2003. Earning Management: New Evidence Based on Deffered Tax Expence. The Accounting Review. Vol 78: 491-521.
- Raharjo, Sahid. 2014. "Cara Melakukan Uji Statistik Deskriptif dengan Software SPSS".<http://www.spssindonesia.com/2014/01/uji-statistik-deskriptifspss.html>. [diakses pada 13 Desember 2016]
- Resmi, S. (2017). Perpajakan : Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Scott, William R. 2006. Financial Accounting Theory. 4th edition. United states & America : Pearson Prentice Hall.
- Stice, J.D., Earl Stice and Skousen. 2007. Intermediate Accounting. 16th Edition. Thomson South-Western, Mason, USA.



- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi: Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak*. Edisi: Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Sulistiyanto, 2008. *Seasoned Equity Offerings: “Benarkah Underperformance Pasca Penawaran?”*.
<http://re-searchengines.com/sulistianto.html>.
- Sumomba, Christina Ranty dan YB. Sigit Hutomo. 2012. *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba*. *Kinerja*. Vol. 16, No.2.
- UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Wild, John J., Subramanyam dan Robert F. Hasley. 2004. *Financial Statement Analysis*, 8th ed. Boston: Mc.Graw-Hill.
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat, Edisi Ketiga.